

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU
DARI FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ALEXANDER

NPM : 1421020049

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2018 M

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur., M. A.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H.,M.Hum.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2018 M

ABSTRAK

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

**Oleh
Alexander**

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya kasus korupsi dalam negara Indonesia..Jika dilihat kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara ini sangat meresahkan masyarakat, ini dapat merusak kualitas dari pemerintahan itu sendiri. Karena dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Dalam perjalanannya Indonesia memiliki berbagai badan untuk menangani kasus korupsi tersebut. Salah satunya adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Dari Latar belakang diatas pokok rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi? Serta Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi? Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana peran KPK dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian pustaka atau library reset yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai peran KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bersifat deskripsi-analisis yaitu analisis hanya sampai tahap deskripsi

Berdasarkan penelitian Peran KPK Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi sudah baik, tapi tidak terlalu banyak kasus yang ditanganinya ini membuat peran dari KPK itu sendiri tidak terlalu terlihat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 minimal kasus yang ditangani yaitu senilai Rp. 1.000.000.000,00 itu membuat perannya kurang terlihat. Dalam Fiqh Siyasah atau yang dimaksud dalam ketatanegaraan Islam, Islam memiliki Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau penindakan saat penguasa atau pemerintah melakukan pelanggaran atas hak masyarakat itu sendiri. Lembaga tersebut adalah Al-Mazhalim.

Kesimpulannya adalah KPK sendiri kurang terlihat peran dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, dikarenakan masih banyak kasus korupsi di Indonesia dan juga keterbatasan tugas dari KPK yang senilai Rp.1.000.000.000,00, dalam RUU agar sedikit menurunkan nilai dari tersebut supaya makin terlihat peran dari KPK itu sendiri. Kemudian ternyata KPK dan Al Mazhalim Memiliki kesamaan yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemerintah yang melakukan kecurangan terhadap masyarakatnya sendiri.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Nama

ALEXANDER

NPM

1421020049

Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)

Fakultas

Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Eti Karin, S.H., M.Hum

NIP. 197308162003122003

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasa Syari'iyah

Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**” disusun oleh Nama : **Alexander NPM.
1421020049** Jurusan **Siyasah Syar’iyyah**, telah diujikan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : **Jum’at, 22 Juni 2018**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

: **Marwin, S.H., M.H**

Sekretaris

: **Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

Penguji I

: **Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

Penguji II

: **Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

Dekan

Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag
NIP. 197009011997031002

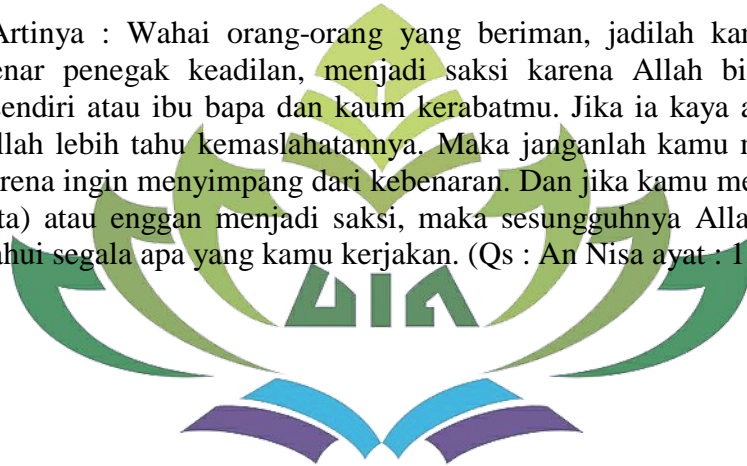
MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ

الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ

تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْزُضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Qs : An Nisa ayat : 135)



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Edi Munadir dan Ibu Sunarti atas pengorbanan dan kasih sayang serta do'a yang selalu dicurahkan untuk anaknya dalam menjalankan kehidupan.
2. Reza Kurnia Putri selaku adik saya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk belajar.



RIWAYAT HIDUP

Alexander adalah putra pertama dari 2 bersaudara, yaitu Alexander dan Reza Kurnia putri. Yang dilahirkan dari pasangan Edi Munadir dan Sunarti. Penulis dilahirkan di Desa Purwodadi Simpang Kec.Tanjung Bintang Kab, Lampung Selatan pada tanggal 22 Agustus 1996.

Pendidikan Pertama dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Purwodadi Simpang, kemudian ke Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Tanjung Sari, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bandar Lampung.

Kemudian pada Tahun 2014 penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Siyash Syar'iyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2014.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi ini dengan judul “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Fiqh Siyasah” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih itu diucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.A, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I selaku kepala jurusan Siyasah yang telah membantu memperlancar jalannya skripsi saya.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A dan Eti Karini, S.H., M.Hum, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh teman-teman seperjuangan satu jurusan dan satu angkatan yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Syari'ah dan pusat yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Rohmi Amalia.
9. Rekan-rekan mahasiswa kkn kelompok 174 yang telah ikut membantu menyelesaikan proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (Skripsi) ini dapat menjadikan sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khusus ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikum

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II WILAYAH AL MAZHALIM DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Pengertian Wilayah Al-Mazhalim.....	16
B. Sejarah Singkat Wilayah Al-Mazhalim	19
C. Dasar Hukum Wilayah Al-Mazhalim	23
D. Kedudukan Wilayah Al-Mazhalim Dalam Tata Negara Islam	26
E. Peran dan Tugas (Kompetensi) Wilayah Al-Mazhalim	28
F. Pendapat Para Ulama Tentang Peranan Wilayah Al-Mazhalim	37

BAB III PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Komisi Pemberantasan Korupsi	40
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	40
2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	46
3. Dasar Hukum Peran Komisi Pemberantasan Korupsi	48
4. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi	49
5. Peran dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi	50
B. Penyelidikan	58
C. Penyidikan	59

D. Penuntutan	61
E. Pemikiran Para Ahli Tentang Peran Komisi Pemberantasan Korupsi	62

BAB IV ANALISIS PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Korupsi	64
B. Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul Karya Ilmiah adalah **“PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut :

Peran adalah proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²

Fiqh Siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian Fiqh Siyasah, perlu

¹Pengertian peran secara umum” (On-line), tersedia di: <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=1>(21(24/10/2017).

² Halid Alkaf, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan tinggi* (Jakarta : CSRC, 2011) hlm.168.

diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep Fiqh Siyasah tersebut.³

Berdasarkan penegasan kalimat yang terdapat dalam judul, maka dapat diambil judul yaitu **“PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH”**.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul ini adalah :

1. Alasan Obyektif

- a. Semakin banyak dan menjamurnya tindak pidana korupsi di negara Indonesia ini dari kalangan pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kemudian Peranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Alasan Subyektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu penulis yakni Siyasah.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana , 2014) hlm.3.

- b. Serta tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, dan busuk. “Korup” juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi.⁴Korupsi juga disebutkan berasal dari bahasa latin *corrumpere* dan *corruptio* yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak⁵

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Hal ini akan mengakibatkan kerugian terhadap negara karena dana yang sudah dianggarkan tidak dapat dialokasi sesuai kebutuhan. Secara luas masyarakat juga akan mengalami dampaknya.⁶

Gejala korupsi sendiri di Indonesia terlihat pada masa awal kemerdekaan, tidak terlihat jelas namun ciri-ciri kegiatan ke arah penyelewengan yang merupakan perbuatan merugikan kekayaan dan perekonomian negara Indonesia. Istilah korupsi mulai dan sangat mencemaskan. Pada masa itu istilah korupsi menjadi sangat terkenal dalam masyarakat, dan terasa sangat mencemaskan.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.257.

⁵Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika : 2014) h.8

⁶ Evi Hartati, *Op.Cit.*

Sementara itu ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tidak dapat berbuat banyak untuk membahas gejala baru yang dinamakan oleh masyarakat korupsi.⁷

Dalam Islam ada beberapa ayat Al-Quran bahwa diisyaratkan seperti korupsi misalnya memakan harta sesama muslim dengan menggunakan jalan yang bathil bagaimana yang dimaksud adalah korupsi akan mendapat dosa. Dimana merampas sebagian hak milik orang lain adalah menjadi salah satu unsur dari korupsi itu sendiri yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْثِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS: Al Baqarah:188)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengambil hak orang lain seperti yang banyak dilakukan oleh pegawai pemerintahan mengambil uang rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya menggelapkan dana pembuatan E-KTP dan lain sebagainya. Namun, terlepas dari sifat tersebut, jelas sekali bahwa disitu ada unsur penggelapan pemalsuan dan memenuhi ciri korupsi. Disitu ada unsur pengkhianatan terhadap amanah, wewenang, dan mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum.⁸

⁷ Elwi Danil, *Korupsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2014) h.28.

⁸ Irfan Abubakar, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta : CSRC, 2011) h.55

Ada ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah dituduh mengambil rampasan perang dalam perang uhud. Ayat ini juga menjadi salah satu ayat yang menjelaskan bahwa yang terdapat dalam unsur korupsi itu sendiri adalah berkhianat. Ayat itu berbunyi :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS: Ali'Imran: 161)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang Nabi tidak mungkin berkhianat atau berbuat curang dalam pembagian harta rampasan seperti yang diisukan oleh orang-orang munafik yang pembohong itu. Sebab, perbuatan curang atau khianat bertentangan dengan kenabian. Maka dari itu, janganlah kalian curiga mengenai hal itu. Barangsiapa berbuat curang atau khianat akan datang pada hari kiamat dengan dosa kecurangan atau pengkhianatannya. Lalu setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Mereka tidak dicurangi dengan kurangnya pahala atau lebihnya hukuman.⁹

Pada awalnya penanganan korupsi dilakukan oleh penguasa militer karena pada masa ini dalam KUHP belum ada delik khusus yang membahas tentang korupsi maka diperlukan adanya keleluasaan bagi penguasa untuk bertindak

⁹“Tafsir Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 161” (On-Line), tersedia di : <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-161#tafsir-quraish-shihab> pada tgl 24-10-2017.

terhadap para pelaku korupsi. Atas dasar itu Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM-06/1957. Pada bagian ini konsideran Peraturan Penguasa Militer itu tergambar adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami kemacetan.¹⁰ Peraturan ini dianggap sebagai cikal bakal dari peraturan perundang-undangan pidana khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam peraturan tersebut penguasa militer berwenang mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan sangat mencurigakan. Jika dalam penilikannya ditemukan adanya harta benda yang mencurigakan, yang asal mulanya diperoleh dari perbuatan melawan hukum, maka penguasa militer memandang perlu melakukan penyitaan. Akan tetapi, tindakan penyitaan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa memiliki dasar hukum untuk itu.¹¹

Dua tahun setelah peraturan penguasa perang pusat tadi diberlakukan, lantas pemerintah memandang perlu untuk menggantinya dengan peraturan yang berbentuk undang-undang. Akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk membentuk sebuah undang-undang, maka instrumen hukum yang di pergunakan untuk itu adalah dengan membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu). Atas dasar itu kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang

¹⁰ Elwi Danil, *Op. Cit.* h.28-29.

¹¹ *Ibid.* h.30

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Korupsi, Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1961.¹²

Dengan peraturan sebelumnya ada sedikit yang membedakan yaitu pada redaksional pada unsur “karena melakukan perbuatan melawan hukum” diganti dengan unsur “melakukan suatu unsur kejahatan atau pelanggaran”, dan penggantian kata “perbuatan” dengan istilah “tindakan” pada rumusan korupsi periode pertama.¹³

Kebijakan untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang mengenai tindak pidana korupsi erat pula kaitannya dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat tentang tindak pidana korupsi, yang oleh pembentuk undang-undang dianggap tidak mampu ditampung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, dan diperkuat dengan berbagai di tengah masyarakat maka perlu mengadakan pembaharuan hukum untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960.¹⁴

Setelah melalui beberapa tahap pembahasan dalam persidangan di lembaga legislatif, akhirnya pada sidang pleno rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh DPRGR untuk ditetapkan menjadi undang-undang yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memformulasikan tindak pidana korupsi hanya dalam satu pasal yaitu pasal 1 yang terdiri dari 2 ayat dan 5 sub.¹⁵

¹² Evi Hartanti, *Op.Cit.* h.22

¹³ Elwi Danil, *Op. Cit.* h.32

¹⁴ *Ibid* . h.36

¹⁵ Ewil Danil, *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Instrumen pidana khusus untuk membahas tindak pidana korupsi, telah menimbulkan perdebatan pada sarjana hukum karena di dalamnya masih terdapat masalah yaitu peralihan yang secara eksplisit dicantumkan. Di dalamnya tidak secara tegas dirumuskan konsepsi pembalikan beban pembuktian yang oleh banyak kalangan diyakini mampu mengeliminasi tingkat keparahan korupsi.¹⁶

Aspek lain di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang cukup menarik dari Undang-Undang sebelumnya adalah dalam konteks pembaharuan hukum pidana secara substantif adalah kebijakan untuk mengambil alih delik dalam berbagai pasal KUHP, dan merumuskannya secara eksplisit sebagai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini lah yang menjadi landasan Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugasnya. Awalnya adalah lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹⁸ Karena banyaknya korupsi terjadi di kalangan penegak hukum sendiri, terdapat keragu-raguan, atau bahkan

¹⁶ *Ibid*, h.54.

¹⁷ *Ibid*, h.56

¹⁸ Evi Hartanti, *Op.Cit.* h.69.

ketidakpercayaan dan apatisme masyarakat terhadap efektivitas fungsi sistem peradilan pidana Indonesia dalam penanggulangan masalah korupsi.¹⁹

Perbuatan korupsi ini sudah selayaknya harus ditindak lanjuti oleh pihak berwenang. Namun proses hukum harus tetap dilakukan sesuai prosedur. Penanganan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bahkan sampai pada tahap penahanan.²⁰

Dalam ketatanegaraan Islam, Islam mengenal Fiqh Siyasah yaitu pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindari dari ke mudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariat yang umum.²¹ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Seperti adanya pembagian menjadi 3 pokok yaitu. Pertama Politik perundang-undangan (Siyasah dusturiyah). Bagian meliputi pengkajian penetapan hukum

¹⁹Elwi Danil, *Op.Cit.*h.220.

²⁰ Ermasjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta : Sinar Grafika : 2010) vii.

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada 1997). h.25

(tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administratif pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi eksekutif.²²

Dalam lembaga peradilan Islam tepatnya pada masa Bani Umayyah mereka mengenal dengan Istilah Wilayat Al-Mazhalim dan Wilayat Al Hisbah yang dimana lembaga peradilan ini menangani permasalahan yang menimpa orang pemerintahan. Al-Mazhalim yang menjadi lembaga peradilan yang mengadili serta memberikan pengawasan bagi para pejabat negara yang bermasalah, baik pejabat itu sendiri atau keluarganya. Wilayat Al-Hisbah adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu Al-Mazhalim, ia juga menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat memungkinkan masih bisa terjadi kekurangan di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian ini dengan judul yang melakukan tindak pidana korupsi **“PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH”**

²² Muhamad Iqbal, *Op.Cit.* h.15-16.

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2011). h. 74

D. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran KPK dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran KPK dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan yang ada berkaitan dengan hal komisi pemberantasan korupsi yang bisa dilihat dari sudut pandang Islam lebih tepatnya kepada Fiqh Siyasah.

- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan jalan penyelesaiannya.²⁴

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun sekunder, penelitian ini dilakukan dengan secara mendalam mengenai komisi pemberantasan korupsi dalam Islam ditinjau dari Fiqh Siyasah dan undang-undang sedemikian rupa agar menghasilkan penulisan yang terorganisir dengan baik.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi-analisis, yakni analisis hanya sampai tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana

²⁴Wardi Backtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, Logos : (Jakarta : cet 1,1997), h.1

pandangan Fiqh Siyasah mengenai peranan komisi pemberantasan korupsi.

2. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian²⁵ dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

²⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed.) Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236.

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasikan. Jadi, dalam hal ini yang maksud mengolah data adalah secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti adapun langkah langkah yang harus diteliti dalam pengolahan data adalah :

a. Pemeriksaan (editing)

Pemeriksaan adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah di pahami.

b. Sistematis data (systematizing)

Sistematisasi data adalah menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. menetapkan data menurut kerangka sitematika bahsa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini hal ini mengelompokan data secara sistematisndata yang di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Analisis Data

Adapun metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat struktur isi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan melihat

bagaimana peran KPK dalam memberantas korupsi, karena dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) penulis dapat menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik artikel, surat kabar, berita radio, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.



BAB II

WILAYAH AL MAZHALIM DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Pengertian Wilayah Al Mazhalim

Kata *Wilayah Al Mazhalim* merupakan gabungan antara dua kata, wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazhalim* adalah bentuk jamak dari *madzlimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman.¹

Secara terminologi *Wilayah al-mazhalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa²

Wilayah al-Mazhalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazhalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.³

¹ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),h.92

² *Ibid*

³ *Ibid*

Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.⁴ Yang dimaksud penguasa adalah bisa disebut *imam* (khalifah) dalam kepemimpinan. Imamah betugas sebagian pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan *ijma* ulama mengangkat seseorang khalifah haruslah yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini.⁵ Seorang imam yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.⁶

Mazhalim pada umumnya diselenggarakan di masjid di bawah kepemimpinan langsung sang khalifah dan terkadang penguasa wilayah atau orang yang mewakilinya. Orang yang duduk di majelis *mazhalim* dikelilingi lima kelompok yang majelis tidak dapat diselenggarakan kecuali dengan kehadiran mereka.⁷

Kelima kelompok tersebut adalah :

1. Aparat keamanan dan beberapa pembantu. Mereka terdiri atas petugas kepolisian yang berfungsi untuk menangani orang yang mencoba untuk melakukan tindak kekerasan atau berusaha lari dari hadapan hakim.

⁴ Alaididin Kotto, et.al, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.132

⁵ Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah), terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.9

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* h. 550

2. Para hakim. Mereka berusaha menghadiri sidang mahkamah mazhalim untuk menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan tuduhan kedua belah pihak dan mengambil kesimpulan hukum untuk diaplikasikan pada perkara yang diajukan kepada mereka.
3. Para ahli fiqh. Hakim mahkamah mazhalim merujuk kepada para hakim dan ahli fiqh tentang permasalahan hukum yang sulit.
4. Para saksi. Yaitu untuk memberikan kesaksian mereka tentang hal yang mereka ketahui perihal pertengkaran dan juga perihal pihak yang bertikai.
5. Sekretaris. Yaitu untuk mencatat ucapan pihak-pihak yang bertikai dan menetapkan hak dan juga kewajiban mereka.⁸

Al-Nizam al-Mazhalim atau *Wilayah al-Mazhalim* yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, *al-qadhi*, *al-muhtasib*, dan *qadhi al-mazhalim* atau *shahib al-mazhalim* dengan tugas yang berbeda. *Qadhi* bertugas memberikan penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masalah ini diangkat beberapa hakim⁹

Pejabat *al-Muhtasib* bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu

⁸ *Ibid.*

⁹ J Syuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h.176

penanganan segera. *Al-Muhtasib* juga bertugas menegakkan amar makruf dan nahi munkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.¹⁰

Sedangkan *qhadi al-Mazhalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* dan *muhtasib*, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki mahkamah *al-mazhalim*. Agar para hakim melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya.¹¹

Secara umum, dapat disimpulkan bawah *Wilayah Al Mazhalim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.¹²

B. Sejarah Wilayah Al Mazhalim

Lembaga ini merupakan bagian dari peradilan yang memerlukan penetapan hukum secara tepat. Faktor yang mendorong Dinasti Umayyah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.74-75.

untuk membuat cabang peradilan ini adalah terjadinya perselisihan antara beberapa pihak yang tidak sepadan, seperti salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai itu adalah seorang pejabat atau penguasa sehingga perlu dilakukan tindakan tegas terhadap lawan yang memandang rendah jabatan hakim.¹³

Orang yang pertama kali mengkaji bentuk peradilan ini adalah Rasulullah SAW, yaitu ketika terjadi perselisihan antara Az-Zubair bin Al-Awwam dengan salah seorang dari Anshar atas masalah pengairan. Ketika keduanya mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda “lakukanlah pengairan wahai Az-Zubair, baru kemudian orang Anshar.” Orang Anshar itu tidak terima dan kemudian berkata, “Az-Zubair memang anak dari bibimu wahai Rasulullah.” Mendengar perkataan tersebut Rasulullah marah dan bersabda, “Wahai Az-Zubair, alirkan air pada perutnya hingga mencapai kedua mata kakinya.” Rasulullah bersabda seperti itu untuk mendidik orang Anshar atas kelancangannya dengan menuduh keberpihakkan Nabi kepada Az-Zubair dikarenakan Az-Zubair adalah putra dari bibi beliau. Hanya saja peradilan ini belum menjadi sebuah aturan, baik pada masa Nabi maupun Khulafaur Rasyidin. Hal ini dikarenakan orang-orang pada saat itu pada umumnya bersikap netral dan tunduk pada hukum yang ada.¹⁴

¹³ Abdussyafi Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah bani Umayyah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), h.77-78

¹⁴ Al-Mawardi, *Prinsip-Prinsip Penyelenggara Negara Islam* (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah), terjemah Padhli Bachri (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.77-78

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktifitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *Wilayah al-Mazhalim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum *al-Qadha*. Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *al-Mazhalim* sudah dipraktikan sejak zaman Nabi dan Khulafa Rashidin namun keberadaannya belum diatur secara khusus.¹⁵

Khalifah yang pertama kali membuat perhatian dan mengkhususkan *Wilayah al-Mazhalim* terpisah dari peradilan umum, adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan khalifah yang memberikan perhatian lebih besar terhadap *Wilayah al-Mazhalim* ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Disamping memperhatikan *Wilayah al-Mazhalim*, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membangun dan menghidupkan wilayah al-syurthah (lembaga kepolisian) dan wilayah hukum operasional lainnya (kompetensi relatif). Lembaga syurtah secara khusus ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang diberi hukum pidana.¹⁶

Dalam Islam, lembaga *Wilayah al-mazhalim* baru muncul pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan. Segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan

¹⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2012) h.114-115

¹⁶ Al-Mawardi, *Op.Cit.*h.75.

oleh lembaga pemerintahan waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika dinasti Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh khalifah, tetapi kemudian khalifah menunjukan seorang wakil yang disebut *qadhi al-mazhalim* atau *shahib al-mazhalim*. Pemegang jabatan ini sendiri tidak mesti seorang hakim, memang hakim lebih diutamakan karena pemahamannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Namun, khalifah seringkali menunjuk pejabat lain yang lebih berwibawa, amanah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga penyelewengan dalam tubuh negara bisa dihentikan. Karena itu pejabat *Wilayah al-Mazhalim* kadangkala adalah seorang menteri peperangan. Penguasa dinasti Abbasiyah yang sangat peduli terhadap eksistensi lembaga *Wilayah al-Mazhalim* adalah khalifah al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun.¹⁷

Dalam masa Abbasiyah lembaga *al-Mazhalim* dikepalai oleh nadzir al-mazhalim, lembaga ini menangani perlakuan tidak adil atau penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah kepada rakyat, seperti pemungutan pajak yang terlalu tinggi dan penyitaan harta tanpa disertai ladsan hukum yang jelas. Lembaga *Mazhalim* juga sebagai lembaga banding, yang berwenang meninjau (membatalkan dan menguatkan) atau putusan-putusan peradilan dan kebijakan para pejabat

¹⁷ Alaidin kotto, *Op. Cit.* h. 133-134.

pemerintah yang lebih rendah. Disini *nadzhir al-Mazhalim* memiliki kekuasaan yang lebih luas dari hakim biasa.¹⁸

C. Dasar Hukum Wilayah al-Mazhalim

Al-qadha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an :



135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (An-Nisa:Ayat:135)

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kerangka dasar tersebut terdapat dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian

¹⁸ Sunaryo Muklas, *Op.Cit. h. 8.*

menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar , yaitu :

1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dan suatu suna Rasul yang wajib diikuti. Maka pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakannya jika benar.
2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah tidak berputus harapan dari keadilan.
3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwah).¹⁹

Penggalan kerangka kerangka dasar selanjutnya adalah :

1. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal.
2. Barang siapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan,. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut

¹⁹ Basiq Djalil, *Op. Cit.* h.14-15

berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik baik penangguhan dan lebih jelaskan keadaan yang samar.

3. Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena keebenaran itu qadim yang tidak dapat di batalkan oleh sesuatu, dan kembali kebenaran itu adalah lebih baik dari pada terus-menerus di dalam kesesatan.²⁰

Kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya :

1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid atau orang yang tertuduh dalam kesaksian karena kerabat. Hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumanNya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau bersumpah.
2. Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perakra tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian

²⁰ *Ibid.*15-16

berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.²¹

D. Kedudukan Wilayah al-Mazhalim

Badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam yaitu :

1. *Al-qadha*, hakimnya *al-qadhi* bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
2. *Al-hisbah*, hakimnya bergelar *al-muhtasib*, menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
3. *An-nadhar fi al-mazhalim*, hakimnya bergelar *qadhi al-mazhalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.²²

Dua institusi yang melengkapi peradilan, yaitu *wilayah al-mazhalim* dan *wilayah al-hisbah* merupakan istilah yang datang kemudian. Tetapi secara empirik, praktiknya sudah terjadi pada zaman Rasulullah. *Wilayah al-mazhalim* bertugas mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Sedangkan *wilayah al-hisbah* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.²³

Secara kelembagaan, *wilayah al-mazhalim* merupakan institusi pengadilan, yaitu suatu kekuasaan peradilan lebih tinggi dari pada

²¹ *Ibid*, 17-18

²² *Ibid*, h. 159-160

²³ Sunaryo Muklas, *Op.Cit*.h.75

pengadilan biasa, sedangkan *wilayah al-hisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Disebut amar ma'ruf nahi munkar karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga ini bertugas menjaga dan mengawasi kecurangan-kecurangan pedagang di pasar.²⁴

Dalam perkembangan berikutnya tugas *wilayah al-hisbah* ini semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang menyimpang, seperti kelancungan timbangan dan meteran yang salah, peredaran uang palsu, dan komoditi palsu. Di samping itu, tugas lain yang diembarkannya adalah membantu orang-orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya.²⁵

Fenomena masyarakat Islam yang sudah meluas dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu tentu menuntut adanya pendampingan, pembinaan, pengawasan, dan penegakkan hukum, yang tidak cukup dengan hanya menyelenggarakan peradilan biasa, tetapi diperlukan adanya pengadilan pelengkap, yang pada masa sebelumnya dikenal dengan *wilayah al-hisbah*²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

E. Peranan dan Tugas (Kompetensi) Wilayah al-Mazhalim.

Dalam bidang peradilan pada awal berkembangnya Islam, Nabi di samping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala hakim tunggal, dan baru kemudian setelah wilayah Islam meluas beliau mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim, khususnya kepada mereka yang ditugaskan mengepalai pemerintahan di wilayah-wilayah di luar Madinah, dengan berpedoman al-Qur'an, sunah Nabi, dan Ijtihad mereka sendiri. Semasa Nabi Saw belum terdapat penjara seperti dalam pengertian sekarang.²⁷

Semasa kekuasaan dinasti Umayyah ketatalaksanaan peradilan makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, para hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Mereka bebas dalam mengambil keputusan dan keputusan mereka juga berlaku terhadap para pejabat tinggi negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepala negara ke delapan dari dinasti Umayyah, menentukan lima keharusan bagi para hakim yaitu :

1. Harus tahu apa yang telah terjadi sebelum dia.
2. Harus tidak mempunyai kepentingan pribadi.
3. Harus tidak menyimpan rasa dendam.
4. Harus mengikuti jejak para imam.
5. Harus mengikutsertakan para ahli dan para cendikawan.

²⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 2008), h.39

Pada waktu itu keputusan hakim mulai dibukukan. Selain itu badan peradilan dibentuk pula peradilan *wilayah al-mazhalim* yang menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunaan oleh pejabat negara, termasuk hakim. Peradilan al-mazhalim ini biasanya diketahui oleh khilafah itu sendiri.²⁸

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilayah al-mazhalim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti kezhaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan *wilayah al-mazhalim* lebih luas dari kekuasaan *qadha*. Serta melakukan penyelidikan, pengaduan-pengaduan terhadap penguasa yang berbuat kezhaliman, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.²⁹

Imam al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut *wilayah al-mazhalim* yaitu sebagai berikut :

1. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. Wilayah al-Mazhalim tidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil.
2. Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. Tugas wilayah al-mazhalim adalah

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Basiq Djalil, *Op.Cit.* h. 166.

mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya.

3. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda.
4. Mengontrol atau mengawasi para pejabat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Tugas Nadzir al-Mazhalim adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku.³⁰

Imam al-Mawardi juga menyebutkan beberapa keistimewaan Nadzir al-Mazhalim, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melihat dan mengawasi tindak kesewenang-wenangan seorang pemimpin atau pejabat terhadap rakyat, serta perilaku mereka.
2. Mengawasi kinerja penarik kharraj ketika memberikan pajak yang memberatkan rakyat. Jika terdapat kelebihan pajak yang masuk ke Baitul Mal, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pajak itu untuk kepentingan mereka, maka harus diambil dan dikembalikan, dan ia harus disiksa.
3. Meluruskan para penulis diwan (sekretaris lembaga), jika terdapat pengurangan atau penulisan harta kaum Muslimin.

³⁰ Al-Mawardi, Op.Cit. H.73-79

4. Mengawasi tindak kezaliman yang dialami para pejabat (pegawai), jika gaji mereka dikurangi atau telah dibayarkan.
5. Melaksanakan tugas seorang qadhi (hakim) dan muhtasib (hisbah) untuk meluluskan hukum syaria, ketika mereka berhalangan.
6. Menjaga pelaksanaan ibadah, seperti haji, hari raya, dan jihad.³¹
1. Peranan Wilayah al-Mazhalim selanjutnya yakni :

- a. Kezaliman Aparat negara

Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas nadhir al-mazhalim adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil bait al-mail.

- b. Mencegah perampasan harta.

Yaitu *Ghusub al-Shultaniyyah*. *Ghusub al-Shultaniyyah* adalah perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas nadhir al-mazhalim adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut. Kemudian, perampasan yang dilakukan oleh “orang

³¹ *Ibid.*

kuat”. Dalam kondisi ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak diambil kecuali dengan empat perkara :

- a. Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut.
- b. Perampasan tersebut diketahui oleh wali al-mazhalim dan ia boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya.
- c. Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut.
- d. Adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut.
- c. Mengawasi harta-harta wakaf.

Harta wakaf ini ada dua macam, yaitu :

- a. Wakaf umum

Tugasnya nadzir al-mazhalim adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan.

- b. Wakaf khusus

Tugas nadzir al-mazhalim adalah memproses perkara setelah adanya pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut.

- d. Menjalankan fungsi hakim

Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar

dari hakim, *nadjir al-mazhalim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.³²

Kompetensi absolut *wilayah al-mazhalim* kemudian juga mencakup peran terkait :

1. Menjalankan fungsi *nadjir al-hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak.
2. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam, seperti perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari pada hak lainnya.
3. *Nadjir al-mazhalim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan lembaga *qadha*.³³

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara berserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qadhi al-mazhalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah *fiqh al-mazhalim*, sehingga diangkat *qadhi al-*

³² *Ibid.* h. 117-118.

³³ *Ibid.* h. 118-119

mazhalim untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.³⁴

Dari sana terlihat bahwa mahkamah mahkamah al-mazhalim memiliki peranan untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangann yang sesuai dengan tabbani (adopsi) khalifah.³⁵

Karena undang-undang ini ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikekembalikan kepada mahkamah al-mazhalim, atau keputusan Allah dan RasulNya. Peranan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayah al-mazhalim* mempunyai keputusan final.³⁶

Mengenai peranan hukum antara *wilayah al-mazhalim* dan *wilayah al-hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *wilayah al-mazhalim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara sogok-menyogok dan korupsi. Orang menangani atau menyelesaikan perkara ini disebut wali al-mazhalim dan disamping itu, lembaga ini bertugas pula menangani kalangan-kalangan praktisi hukum yang melakukan berbagai pembiasaan dan riswah (sogok menyogok diantar dua belah pihak).

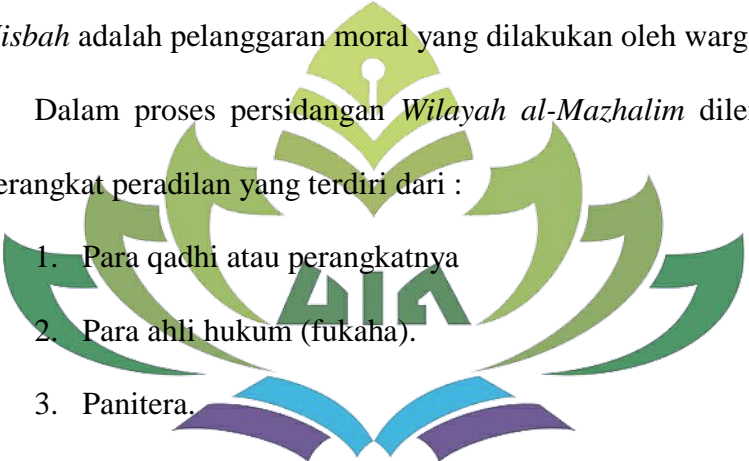
³⁴ Imam Amrusi Jaelan, et. *Op. Cit*, h. 34.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Keberadaan lembaga *al-Mazhalim* itu memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam menjaga keuangan-keunagan negara dari tindakan-tindakan korupsi. Sedangkan hakim pada *Wilayah al-Hisbah* tidak memiliki peranan tersebut. Hakim pada *Wilayah al-Mazhalim* memiliki peranan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, sedangkan pada *Wilayah al-Hisbah* peranannya terbatas. Kasus-kasus yang ditangani oleh *Wilayah al-Mazhalim* adalah kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dan warga negara, sedangkan *Wilayah al-Hisbah* adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.³⁷

Dalam proses persidangan *Wilayah al-Mazhalim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri dari :

- 
1. Para qadhi atau perangkatnya
 2. Para ahli hukum (fukaha).
 3. Panitera.
 4. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya.
 5. Para penguasa.
 6. Para saksi.

Kelengkapan *Wilayah al-Mazhalim* dimaksud agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.³⁸

Dalam kasus *al-Mazhalim*, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apa bila

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

mengetahui adanya kasus al-Mazhalim, qadhi (hakim) peradilan al-Mazhalim memiliki kekuasaan untuk hal sebagai berikut :

1. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku parapejabat berserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, dan mencegah kecenderungan mereka bertindak jujur.
2. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum negara.
3. Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara.
4. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya.
5. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.³⁹

Secara khusus peradilan ini juga menangani perkara yang diadukan sebagai berikut :

1. Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan atau ditangguhkan secara sepihak.
2. Harta yang diambil secara paksa oleh penguasa.
3. Pembayaran aparat negara.
4. Persengketaan mengenai harta wakaf.
5. Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemah posisi peradilan.

³⁹ Alaidin Kotto. *Op. Cit.*, h.133

6. Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan hisbah, sehingga mengakibatkan terabaikannya kemaslahatan umum.
7. Pelaksanaan ibadah pokok, seperti shalat berjamaah, shalat jum'at, shalat id, dan pelaksanaan haji.
8. Penanganan kasus al-Mazhalim, penetapan hukum, dan pelaksanaan keputusan tersebut,⁴⁰

F. Pendapat Ulama Tentang Wilayah Al-Mazhalim

1. Imam al-Mawardi

Orang yang pertama kali menjelaskan bentuk peradilan ini adalah Rasulullah SAW, yaitu ketika terjadi perselisihan antara Az-Zubair bin Al-Awwam dengan salah seorang dari Anshar atas masalah pengairan, ketika keduanya mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda “lakukanlah pengairan wahai Az-Zubair, baru kemudian kaum Anshar.” Orang Anshar itu tidak terima dan kemudian berkata “Az-Zubair memang anak dari bibimu wahai Rasulullah.” Mendengar perkataan tersebut Rasulullah marah dan bersabda, “Wahai Az-Zubair, alirkan air pada perutnya hingga mencapai kedua mata kakinya.” Rasulullah bersabda seperti itu untuk mendidik orang Anshar atas kelancangannya dengan menuduh keberpihakkan Nabi kepada Az-Zubair dikarenakan Az-Zubair adalah putra dari bibi beliau. Hanya saja peradilan ini belum

⁴⁰ *Ibid.*

menjadi sebuah aturan, baik pada masa Nabi maupun Khulafaur Rasyidin. Hal ini dikarenakan orang-orang pada saat itu pada umumnya bersikap netral dan tunduk pada hukum yang ada.⁴¹

2. Prof. Dr. Harun Nasution

Dalam upaya pemberantasan korupsi pada masa Dinasti Umayyah didirikanlah kelembagaan *wilayah al-mazhalim* yang ada sejak masa Abdul Malik bin Marwan (685-705M). Lembaga ini sebelumnya dirintis oleh Ali bin Abi Thalib. Jika pengawasan dan terhadap peradilan terhadap masyarakat dari tindak penyelewengan ibadah, *mu'amalah* (interaksi sosial ekonomi) seperti kecurangan dalam berdagang dan penyelewengan dalam akidah, dalam sejarah Islam dikenal dengan wilayah hisbah, semacam polisi syariah. Untuk penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau penguasa, dalam sejarah Islam dikenal dengan kelembagaan *wilayah al-mazhalim*, yaitu lembaga yang mengawasi dan berwenang dalam menggelar peradilan terhadap kezaliman penguasa atau pejabat publik guna melindungi hak-hak masyarakat.⁴²

3. Al Kindi

Al Kindi menyebut dengan *Qadaha' Al-Mazhalim* ini merupakan bagian dari peradilan yang memerlukan penetapan hukum secara cepat. Faktor yang mendorong Dinasty Ummayah untuk membuat

⁴¹ Al-Mawardi, Op,Cit. h. 77-78

⁴² Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. ke-11, suplemen jilid 2, h.51-53.

cabang peradilan ini adalah terjadinya perselisihan antara beberapa pihak yang bertikai itu adalah seorang pejabat atau penguasa sehingga perlu dilakukan tindakan tegas terhadap lawan yang memandang rendah jabatan hukum⁴³



⁴³ Lihat dalam Abbusyafi Muhammad Abdul Latief : terjemah dari : Al-Kindi/*Al-Wullah wa Al-Qudhah*/hlm.310

BAB III

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Pertumbuhan korupsi di Indonesia teruslah meningkat dan dikaitkan dengan ketidak mampuan hukum pidana maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang korupsi suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Meningkatnya angka tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan mebeca bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa bernegara pada umumnya.²

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga, tindak pidana korupsi tidak

¹ Elwi Danil, *Korupsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.76.

² *Ibid.*

lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* yang memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa pula³

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan membentuk badan khusus Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi⁴

Secara resmi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pemerintah pada bulan Desember 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memiliki peranan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk dalam

³*Ibid.*

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab 1 Pasal 3-4.

⁵ Halid Alkaf, et. al. Pendidikan anti Korupsi di Perguruan Tinggi (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture 2011), h.168.

melakukan penyhelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban tugas dan peranan keanggotaannya dioatur dengan Undang-undang.⁶

Korupsi dapat diartikan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁸

⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit.* h.69

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 2 Pasal 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab 2 Pasal 3.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari beberapa aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan, korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut⁹ :

- a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh : seorang pelayan prizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih pemberian uang tambahan itu dibungkus dengan “tanda ucapan terima kasih”, dan diserahkan setelah layanan diberikan.

- b. Illegal Corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Contoh : Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus memallui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya

⁹ Ermansjah, *Memberantasa Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.23

anggaran lambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak, misalnya pada pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “force majeure”. Dalam pasal ini dikatakan, bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”. Dari sinilah dimulainya illegal corruption, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat.

Andaikata dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi “termasuk ke dalam keadaan darurat ialah suatu keadaan yang berada diluar kendali manusia”, maka dengan serta merta, pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur yang berada diluar kendali manusia, yang dipergunakan oleh pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompeten¹⁰

¹⁰*Ibid*

- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh : Dalam persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk memenangkan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau secara terang terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu.¹¹

Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender, maka perbuatan lelang ini sudah termasuk kedalam kategori *mercenary corruption*. Bentuk “sogok” atau semir itu tidak mutlak berbentuk uang tapi bisa juga dalam bentuk lain.

- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh : Kasus penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.

Fakta atau kenyataan bahwa penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan

¹¹*Ibid*

karena banyak yang harus dilakukan penegak hukum bukan hanya menangani tindak pidana korupsi.

Sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.¹²

2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan sebuah Undang-undang baru sebagai suatu instrumen hukum pidana dalam penanggulangan korupsi, dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar alasan utama yaitu:¹³

a. Alasan Sosiologis

Krisis kepercayaan dalam setiap segmen kehidupan yang melanda bangsa Indonesia, secara macro bermuara pada suatu penyebab besar, yaitu belum terciptanya suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi. Pemerintah dianggap belum bersungguh-sungguh, dan cenderung bersikap diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menegakkan hukum, mengakibatkan bangsa ini harus membayar mahal, sebab realitas korupsi telah

¹² *Ibid.*

¹³ Elwi Danil, Op.Cit, h.40

menghancurkan dan meluluhlantakan perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat.

b. Alasan Praktis

Alasan dan latar belakang pembentukan sebuah Undang-undang dapat diketahui antara lain dari bunyi konsideran undang-undang yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana undang-undang ini dibentuk dengan suatu kesadaran dan pengakuan, bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di samping itu, Korupsi telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut adanya efisiensi tinggi. Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka Korupsi harus diberantas.

Pertimbangan lain sebagai dasar pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah, bahwa undang-undang korupsi sebelumnya, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru, sehingga demikian diharapkan ia akan lebih efisien dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di masa depan.

c. Alasan Politis

Semangat untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan salah satu subsistem semangat reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia. Dalam hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan “*good goverment*”, antara lain gerakan untuk memberantas KKN. Secara substantif gerakan itu diawali dengan terbitnya ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di dalam ketetapan MPR tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten.

3. Dasar Hukum Peran Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berperan memberantas tindak pidana korupsi, yang diatur dalam beberapa hukum positif, yaitu :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada pasal 2 angka 6 huruf a ketetapan tersebut menyebut arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme adalah membentuk Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan

pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan saksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapat informasi, etika pemerintahan, dan ombudsman.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi¹⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas :

¹⁴*Ibid.* h.71.

- a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Tim penasihat yang terdiri atas empat anggota.
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelaksana tugas¹⁵.

5. Peran dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Kelahiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga sebelumnya dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicita-citakan sebagai lembaga *trigger mechanism* yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.¹⁶

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berperan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hibnu Nugroho, “*efektifitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*” Jurnal Dinamika Hukum No 3. Vol 13.

- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi,
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁷

Dalam melaksanakan tugas koordinasinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran :

- a. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berperan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.¹⁸

Dalam melaksanakan tugas supervisinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan peranannya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki peran

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7.

mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.¹⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki peran melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)²⁰

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan :

- a. Penyadapan dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11.

- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.²¹

²¹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan komisi pemberantasan korupsi berhak melakukan :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.²²

Dalam melaksanakan tugas monitor komisi pemberantasan korupsi dapat :

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan,

²²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13.

jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan tersebut tidak diindahkan.²³

Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang tugas, fungsi dan peranannya berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena itu pengaturan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati (prudential) agar tidak terjadi tumpang tindih peranan dengan berbagai instansi yang telah ada tersebut.²⁴

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi yang sesungguhnya yaitu meliputi :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat: dan/atau.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²⁵

²³Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 14.

²⁴ Ermansjah Djaja, *Meredesain pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.244.

²⁵Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 10.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diatur di dalam undang-undang ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi-institusi yang telah ada *counterpartner* yang kondusif sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- b. Tidak memonopoli tugas dan peran penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi *trigger mechanism*.
- d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan membantu institusi-institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.²⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan peranannya bebas dari intervensi dari kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun lembaga negara lainnya).

²⁶*Ibid.*

Untuk menjamin dan memperkuat pelaksanaan tugas dan peranannya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat tim penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihan atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktifitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, jika dimungkinkan melalui pelaksanaan program kampanye publik secara berkala, sistematis dan pemberantasan korupsi di Indonesia kepada masyarakat, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dipantau oleh masyarakat luas.²⁷

Dalam melaksanakan tugas dan peranannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.²⁸ Untuk mewujudkan asas proporsionalitas dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugas dan peranannya bertentangan dengan undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku.²⁹

²⁷ *Ibid.* h. 246

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5

²⁹ Emansjah Djaja, *Op.Cit*, h. 247

B. Penyelidikan

Segala peranan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi³⁰

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah atau bertindan untuk dan atas nama Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK).³¹

Penyelidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.³² Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat tujuh hari jam kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti

³⁰ Evi hartanti, *Op.Cit.* h. 71

³¹ *Ibid.*

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 43.

permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.³³

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.³⁴

C. Penyidikan

Penyidikan adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang di angkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁵

Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikan. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat :

- a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita

³³ Evi Hartanti *Op.Cit*, h. 72.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 45.

- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan.
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lainnya.
- d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan.
- e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.³⁶

Salinan berita acara disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.³⁷

Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan benda harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.³⁸

Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit.* h. 72.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* h. 73.

sudah mulai melakukan penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.³⁹

D. Penuntutan

Mengenai tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meliputi :

1. Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU).
4. Penuntu umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri.
5. Dalam hal melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri

³⁹Ibid

wajib menerima pelimpahan berkas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dan diputuskan⁴⁰

E. Pemikiran Para Ahli Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beberapa delik dimasukan ke dalam delik umum. Yang akan mengganggu kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Kemudian para ahli berpendapat.⁴¹

1. Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa delik korupsi yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor telah diambil alih oleh RKUHP tetapi dimasukkan dalam bab-bab terpisah dengan judul bab berbeda dengan delik umum, sehingga hal ini tentu berimplikasi yuridis terhadap kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK yang selama ini hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus.

2. Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Usulan memasukkan delik tindak pidana korupsi dan pencucian uang diatur dalam RKUHP mengindikasikan banyaknya kepentingan yang bertautan dengan eksistensi Komisi

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 52.

⁴¹“Komisi Pemberantasan Korupsi” (On-Line), tersedia di : <https://web.facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi/photos/a.608567255854925/1906030122775292/?type=3&theater>. (24 Agustus 2018).

Pemberantasan Korupsi (KPK). Memaksakan kodifikasi atau memasukan semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ke dalam RKUHP hanya menimbulkan kerusakan hukum.

3. Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M. H.

UU Tipikor mengatur hukum pidana (materiil) sekaligus hukum acara pidana (formil), apabila UU Tipikor masuk ke dalam RKUHP dapat dipastikan Hukum Acara Pidana yang menyimpangi di dalam UU Tipikor akan diubah pula.



BAB IV

ANALISIS PERANA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi.

Negara Indonesia adalah negara hukum, bentuk aplikasi dari negara hukum ini adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini korupsi sangat sulit untuk diberantas dalam kehidupan di Indonesia bahkan di belahan dunia lainnya. Karena korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat besar dan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi termasuk dalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan penanganan khusus oleh suatu badan atau lembaga independen yang khusus berwenang mengurus masalah penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Maka, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif penegakan hukum di Indonesia dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bukan sekedar alternatif penegakan hukum semata yang ada di Indonesia dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang kuat dan independen dalam penanganan kasus korupsi yang telah lama ada di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, bisa dikatakan sebagai suatu organisasi superbody yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum yang lain, khususnya dalam masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Mulai dari penyelidikan, penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa. Sedangkan, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 6 huruf c. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 6 yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa dengan melibatkan aparat penegak hukum atau lembaga hukum yang lain. Dimana aturan ini memang digunakan

untuk lebih menjaga keindependensian sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesungguhnya telah menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, karena lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum yang kaitannya dengan kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Karena apabila kasus-kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, maka di khawatirkan akan menimbulkan intervensi dari pemegang kuasa. Maka dengan adanya Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang obyeknya adalah para pejabat, dan penyelenggara negara.

Peran yang dimaksud di sini adalah peran yang memang lebih bisa menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang memang termasuk dalam kategori lembaga khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangani hanya kasus yang berhubungan dengan korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang obyeknya adalah para pejabat, para penyelenggara negara, serta para penegak hukum yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan

begitu kejahatan tindak pidana korupsi memang harus memerlukan suatu penanganan yang dilakukan oleh lembaga yang khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi serta lembaga tersebut harus independen dan tidak memiliki kepentingan dengan kelompok atau golongan.

Adanya peran yang penulis maksud di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sesungguhnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sudah cukup kuat dan sudah bisa membuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugasnya yang sangat berat dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, penyelenggara negara. Bahkan di era yang lebih modern ini, korupsi terkadang dilakukan dengan cara berjamaah atau bersama-sama yang melibatkan banyak orang, serta lebih cerdik lagi para koruptor menyembungkan hartanya dari hasil korupsi, agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau bahkan bisa juga dengan cara melibatkan tangan orang lain yang sesungguhnya itu adalah orang mereka.

Maka dengan begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang membutuhkan para pegawai yang sangat independensi dan kredibilitas yang tinggi serta memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Karena penanganan kasus didalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kompleks dan membutuhkan orang-orang yang cepat serta sigap

dalam bekerja menangani kasus-kasus yang dihadapinya, karena korupsi sekarang tidak seperti korupsi di era masa lalu. Korupsi sekarang lebih maju cara para koruptor untuk bisa melakukan kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Tetapi para koruptor masa lalu, yang mereka pakai dalam melakukan tindak pidana kejahatan menggunakan cara konvensional, jadi penanganannya tidak sekompleks dimasa sekarang.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membutuhkan orang-orang yang independen dan mempunyai kredibilitas yang tinggi, biasanya ditaruh di dalam bagian penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Karena di dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, adalah suatu proses yang memang diperlukan kehati-hatian dalam melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena ketiga proses tersebut adalah menentukan seorang tersangka, bisa diadili di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aturan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini berbeda dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berada di bawah lembaga kepolisian dan kejaksaan yang secara umum diatur dalam pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena fungsi

penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi KPK tidak terlalu terlihat karena terbatasnya ruang lingkup cakupan penanganan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dalam pasal 11 yaitu senilai Rp. 1.000.000.000,00. Ini membuat Peran dari KPK sendiri hanya seputar angka yang sangat besar, dan membuat kasus dibawahnya tidak tersentuh KPK.

Pada praktiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki banyak kesulitan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangani suatu kasus yang melibatkan para aparaturnya penegak hukum. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering mengalami kekalahan di dalam sidang praperadilan, padahal sesungguhnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengenal yang namanya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan). Komisi Pemberantasan Korupsi sering mengalami kekalahan karena yang dipermasalahkan adalah tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena yang melakukan tugas tersebut bukan dari kalangan kejaksaan atau dari kepolisian RI, akan tetapi dari lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 30

Tahun 2002 dalam pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki hak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau.
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Disinilah yang menjadi tumpang tindih peranan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Yang mana ketiga lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang sama dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Maka, seharusnya ada satu sisi pembeda kekhususan di dalam undang-undang yang mengatur peranan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Agar terciptanya suatu peradialn yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan tidak menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat.

Peran tersebut sangat dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun tugas dan peranan KPK telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 di dalam Bab II di dalam pasal 6 hingga pasal 15

yang telah mengatur sedemikian rupa agar kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kuat. Tetapi, undang-undang tersebut masih terbentur dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih berlaku untuk beracara di dalam peradilan Indonesia. Misalnya, dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur di dalam bagian kesatuan penyelidikan dan penyidikan yang berada dalam pasal 4 tentang penyelidikan, pasal 6 tentang penyidikan, dan bagian ketiga penuntut umum di dalam pasal 13. Pasal-pasal inilah yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkadang sering mengalami kesusahan dalam menjalankan tugas dan peranannya atau mengalami kekalahan di dalam sidang pra peradilan.

Penanganan tersebut harus dibuktikan dengan adanya suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh eksekutif bersama legislatif yang berisi suatu aturan agar memperluas ruang gerak dari KPK itu sendiri dalam melakukan pemberantasan Korupsi tidak hanya fokus pada nilai yang besar saja, tapi pada kasus yang kecil agar korupsi dapat ditangani seluruhnya.

B. Analisi Fiqh Siyasah terhadap Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsep Fiqh Siyasah yang digunakan yaitu dengan menggunakan Wilayah al-Mazhalim, yang berarti lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak

rakyat. Dimana lembaga ini harus berdiri sendiri dan tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugas menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Karena peradilan ini juga memiliki satu peranan khusus dan satu atap dalam melakukan penindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat negara.

Lembaga Al-Mazhalim seperti dengan peradilan khusus atau peradilan pidsus (pidana khusus) yang ada di Indonesia yang menangani tentang masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, atau para penguasa yang ada di Indonesia. Lembaga ini disebut dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menangani kasus-kasus yang bernuangan korupsi, pencucian uang, dan suap-menyuap yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara. Karena kejahatan ini dilakukan oleh para penguasa atau pejabat, maka penanganannya harusnya menggunakan penanganan khusus ketika dilakukan penyelesaian terhadap kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.

Maka, penulis menggambarkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini identik namun tidak sama persis dengan Al-Mazhalim yang ada dalam peradilan Islam. Dengan menggunakan teori Al-Mazhalim, bisa dibuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai acuan dalam semangat pemberantasan Kejahatan tindak pidana Korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik

dan penuh dengan rasa keadilan sosial masyarakat serta dengan diharapkan mampu melepaskan Indonesia dari segala bentuk kejahatan korupsi yang telah mendarah daging.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan Korupsi telah tepat dan benar. Hanya saja peran dari KPK itu sendiri tidak terlalu signifikan dikarenakan adanya aturan minimal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dalam pasal 11 senilai Rp, 1.000.000.000,00. Ini menjadikan banyaknya kasus korupsi kecil yang masih ditangani oleh aparat yang lain, yang tidak diketahui masyarakat umum.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan teori Wilayah Al-Mazhalim memang sudah tepat, karena peran dari Wilayah Al-Mazhalim hampir sama dengan apa yang telah dijalankan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Karena obyek yang di tangani keduanya adalah seseorang yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan, yaitu para penguasa atau para pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kezaliman yang dilakukan kepada rakyat.

B. Saran

1. Adanya pembatasan nilai korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini membuat peran dari KPK itu sendiri tidak terlihat. Maka sebaiknya agar dibuatkan suatu aturan oleh eksekutif bersama legislatif yang lebih bagus dan kuat untuk KPK itu sendiri dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik. Agar dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam memberantas korupsi dan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.
2. Islam juga memberikan suatu konsep lembaga yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menjalankan suatu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah bersama legislatif bisa menggunakan konsep Wilayah Al-Mazhalim, untuk bisa mewujudkan pelaksanaan suatu peradilan yang independen dan kredibilitas dalam menangani suatu kasus yang melibatkan para penguasa atau para pejabat yang menang kasus tersebut hanya dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan tidak memiliki suatu kepentingan apapun dalam menangani kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hipriansah, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemisahan percampuran tahanan orang dewasa dan anak*, skripsi UIN Raden Intan Lampung 2016
- Adami Cazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo 2016
- Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta : Sumbangsi 1975
- Alfabeta. Safari Imam Asyaari, *Suatu pendekatan praktis metodologi penelitian sosia*, Surabaya : Usaha Sosial 1981
- Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka 2006
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu 1997
- As-Suyuthi, Jalaluddin & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*.
- Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik*. Jakarta : Restu Agung 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah 30 juz (revisi Depag Terbaru)*, PT. Qomari Prima Publisier, Solo, Indonesia.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika 2010.
- Harun Zen, *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*. Bandung : Jabal 2011
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika 2014.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Jakarta : Qisthi Pers. 2015.
- Imam an-Nawawi, *Riyad as-Salibin min kalam sayyid al-Mursalin*, (Surabaya) 2001.
- Muklas, Oyo Sunaryo *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D* Bandung: 2013

Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia kotemporer*. Jakarta :Modern English pers 1999

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar lampung : Universitas Lampung 2009

Undang-undang KPK UU RI no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta : Pustaka Mahardika 2016

Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang Undang Republik indonesia nomor 20 tahun 2001.

Wardi Backtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, Logos : Jakarta Grafika Indo 1997

Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-istisad al-Islami* Maktabah Wahbah, Kairo : 2001

Sumber Internet

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tentang Pengertian Komisi Pmberantasan Korupsi*,:(On-line), tersedia di : <https://www.kpk.go.id/id/splash>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-komisi-pemberantasan-korupsi.html>.

<https://www.merdeka.com/komisi-pemberantasan-korupsi/>.

Sumber Bacaan

Abdul Hayy Al-Kattani, *Nizam Al-Hukumah An-Nabawiyyah*

Abu Zaid Syalabi. *Tarikh Al-Hadharah Al-Islamiyyah*

Al-Kindi, *Al-Wullah wa Al-Qudha*

Dr. Ibrahim Najib, *Al-Qadha 'fi Al-Islam*

Dr. Hasan Ibrahim dan Dr. Ali Ibrahim, *Nuzum Al-Islamiyah*